

## Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sampah Untuk Kota Yang Lebih Berkelanjutan

Nurul Farida<sup>1\*</sup>, Dinda Sabrina<sup>1</sup>, Nazhar Yoga Ariyanto<sup>1</sup> dan Nunun Nurhajati<sup>1</sup>

1. Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulungagung, Indonesia

Email korespondensi: nurulfarida485@gmail.com

### How to Cite:

Farida, N., Sabrina, D., Ariyanto, N. Y., & Nurhajati, N. (2026). Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sampah Untuk Kota Yang Lebih Berkelanjutan. *Jurnal Widya Mahavira*, 2(1), 36-41

**Abstract-** Waste management is a strategic issue in urban development that directly affects public health, environmental quality, and urban sustainability. Rapid population growth and increasing urban activities have led to a continuous rise in waste generation, while management capacity remains limited. This article aims to analyze the implementation of waste management policies and the factors influencing their effectiveness in achieving sustainable cities. The study employs a qualitative descriptive approach through a literature review, examining relevant regulations, academic literature, and previous research. The analysis is based on George C. Edward III's policy implementation model, which emphasizes communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the effectiveness of waste management policies is strongly determined by consistent policy communication, adequate resources, implementers' commitment, and institutional coordination. The application of the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) strategy and increased community participation are key factors in supporting sustainable urban waste management.

**Keywords:** Public policy; waste management; policy implementation; 3R; sustainable city

### Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki kewajiban utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat. Di wilayah perkotaan, persoalan pengelolaan sampah semakin kompleks seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan intensitas aktivitas urban. Sampah tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan kebersihan, tetapi telah berkembang menjadi permasalahan multidimensional yang berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan kota. Pertumbuhan kota yang berlangsung cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan fiskal pemerintah daerah, sehingga memperbesar potensi permasalahan lingkungan perkotaan, termasuk persoalan sampah (Prihatin, 2020).

Secara teoritis, pengelolaan sampah mencakup serangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari upaya pengurangan hingga penanganan sampah. Namun, realitas di berbagai kota di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berorientasi pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Pola tersebut dinilai kurang efektif karena keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta terus

meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kondisi ini menuntut adanya perubahan arah kebijakan menuju pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pola konsumsi masyarakat perkotaan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan gaya hidup, teknologi, dan peningkatan pendapatan. Konsumsi sebagai aktivitas pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup berimplikasi langsung pada meningkatnya timbulan sampah domestik. Perilaku konsumsi individu dipengaruhi oleh rasionalitas, pendapatan, serta gaya hidup masyarakat, yang pada akhirnya menentukan besarnya volume sampah yang dihasilkan (Utari et al., 2022).

Walaupun regulasi mengenai pengelolaan sampah telah disusun, pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan teknis, seperti keterbatasan sarana prasarana, kondisi infrastruktur permukiman yang tidak mendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat, kerap menghambat efektivitas kebijakan. Selain itu, persoalan kelembagaan berupa keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kurang optimalnya sosialisasi kebijakan turut memperbesar kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Selain berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan, permasalahan pengelolaan sampah juga menimbulkan beban ekonomi yang signifikan akibat tingginya biaya pengelolaan serta keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir di kota-kota besar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Kebijakan et al., 2011).

Aspek sosial juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Pengalaman pengelolaan fasilitas pengolahan sampah berskala besar menunjukkan bahwa kebijakan yang mengabaikan dampak sosial berpotensi menimbulkan penolakan dan konflik dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi, berorientasi pada partisipasi masyarakat, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya mewujudkan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat melalui program pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti Bank Sampah, berperan penting dalam mengurangi timbulan sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sosialisasi, serta kurangnya fasilitas pendukung masih menjadi kendala utama dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan edukasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, berdaya guna, dan berwawasan lingkungan (Saputra et al., 2022).

## **Kajian Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik untuk bertindak maupun tidak bertindak, dalam rangka mengatasi permasalahan publik. Kebijakan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengarahkan tindakan kolektif guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks lingkungan hidup, kebijakan publik berperan sebagai landasan normatif dan operasional bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat melalui

---

pengelolaan sumber daya dan pengendalian dampak lingkungan (Warassih, 2005).

Selain itu, kebijakan publik dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai konsep filosofis, produk kebijakan, proses, serta kerangka kerja. Sebagai konsep filosofis, kebijakan publik mencerminkan nilai, prinsip, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam mengelola kehidupan bermasyarakat. Sebagai produk, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan formal yang memiliki kekuatan hukum. Sebagai proses, kebijakan publik melibatkan tahapan perumusan, implementasi, hingga evaluasi untuk menilai efektivitas pencapaiannya. Sementara itu, sebagai kerangka kerja, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program pemerintah guna menyelesaikan berbagai permasalahan publik secara sistematis dan terarah (Anggaraeni, 2019).

### ***Pengelolaan Sampah dan Urgensinya***

Pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari kebijakan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pengelolaan sampah mencakup serangkaian proses yang sistematis dan berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjamin terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi (Damanhuri & Padmi, 2010).

Urgensi pengelolaan sampah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Komposisi sampah nasional menunjukkan bahwa sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga. Peningkatan volume sampah tersebut berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan perbedaan tingkat pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat (Widiyanto et al., 2017). Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah berpotensi menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.

Permasalahan sampah juga dipicu oleh meningkatnya penggunaan plastik dan barang sekali pakai akibat perkembangan teknologi dan industri. Sampah yang tidak terkelola dengan baik tidak hanya menimbulkan gangguan estetika, tetapi juga berkontribusi terhadap risiko banjir, pencemaran lingkungan, dan degradasi kualitas tanah (Kurniawan et al., 2019). Ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai solusi tunggal semakin tidak memadai karena keterbatasan kapasitas dan minimnya penanganan lanjutan terhadap sampah yang terus bertambah (Rahmadani & Rahmawati, 2021).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah perlu diarahkan pada penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta pengembangan konsep circular economy, yang memandang sampah sebagai sumber daya bernilai. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar dapat berjalan optimal dan berkelanjutan (Anindita Meutiasari, Kismartini Kismartini, n.d.).

### ***Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward Iii***

Kebijakan publik sering kali disamakan dengan kebijaksanaan, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Kebijakan publik tidak memiliki definisi tunggal, sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan aktif maupun keputusan untuk

---

tidak bertindak oleh pemerintah.

Anderson memandang kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang disengaja dan berorientasi tujuan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor untuk menangani suatu masalah publik. Sementara itu, Hoogerwerf menekankan bahwa kebijakan merupakan respons terhadap suatu masalah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah permasalahan melalui tindakan yang terarah. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kebijakan publik berkaitan dengan pertanyaan mengenai apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, siapa yang melaksanakan, kapan dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. George C. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang menjembatani keputusan kebijakan dengan dampaknya terhadap masyarakat. Implementasi melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan dukungan sumber daya dan aturan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan kebijakan.

Menurut model implementasi kebijakan George C. Edward III, terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada pelaksana. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung. Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian kewenangan, dan koordinasi antar lembaga (Kencana, 2016).

### ***Pendekatan Sosial dan Perilaku dalam Pengelolaan Sampah***

Pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan perilaku masyarakat. Pendekatan perilaku menekankan pentingnya sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan aktif masyarakat serta upaya pembentukan perilaku ramah lingkungan secara berkelanjutan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kebijakan pengelolaan sampah.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran, seleksi, dan pengelompokan literatur berdasarkan relevansi substansi dan kredibilitas sumber. Literatur yang digunakan dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian tema, tahun publikasi, serta kontribusinya terhadap pembahasan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan cara menginterpretasikan konsep, temuan, dan gagasan utama dari setiap sumber pustaka.

Analisis data dilakukan dengan mengaitkan hasil kajian literatur pada kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya,

---

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

## Pembahasan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan operasional. Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi menjadi faktor awal yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Sosialisasi kebijakan yang belum merata menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme pengelolaan sampah, yang pada akhirnya berdampak pada minimnya partisipasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan secara efektif dan konsisten.

Dari sisi sumber daya, keterbatasan armada pengangkut, fasilitas pengolahan sampah, serta dukungan anggaran operasional masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada rendahnya kapasitas pelayanan dan tidak optimalnya pengelolaan sampah di tingkat daerah. Selain itu, disposisi pelaksana kebijakan turut memengaruhi kualitas implementasi. Rendahnya komitmen aparat dan lemahnya pengawasan menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Aspek struktur birokrasi juga menunjukkan permasalahan tersendiri, terutama terkait koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dan prosedur kerja berpotensi menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program serta inefisiensi birokrasi. Dalam konteks pengurangan timbulan sampah, penerapan strategi 3R merupakan langkah strategis yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran, sikap, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan, pemberian insentif ekonomi, serta pengelolaan dampak sosial, termasuk kompensasi bagi masyarakat terdampak, menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah.

## Simpulan

Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan merupakan persoalan penting yang menuntut kebijakan publik yang dirancang dan dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap serta komitmen pelaksana, dan keteraturan struktur birokrasi. Berbagai kendala seperti terbatasnya fasilitas dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang optimalnya pengawasan menjadi penghambat dalam mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah secara optimal.

Di sisi lain, upaya pengurangan sampah melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) memiliki potensi besar dalam menekan jumlah timbulan sampah, namun

keberhasilannya sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat peran edukasi lingkungan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam mendukung terwujudnya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih dapat penulis buat dibagian ini bagi mereka yang mendukung penelitian (sponsor dan responden). Keluarga dan pengawas tidak diizinkan di bagian ini.

## Daftar Pustaka

- Budiman, & Jaelani, A. K. (2023). The policy of sustainable waste management towards sustainable development goals. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(1), 70–94.
- Lagman-Bautista, J. (2020). Crafting a theoretical framework on waste management: A case for sustainable cities. *International Journal of GEOMATE*, 18(68), 80–86.
- Manoppo, V., Londa, V. Y., & Laloma, A. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Wanea Kota Manado.
- Silahudin, & Lestari, S. (2024). Pengelolaan sampah: Tinjauan kebijakan.
- Verawati, S., & Tuti, R. W. D. (2020). Policy implementation of solid waste management in South Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 118–126.
- Widayati, T., Nurchayati, N., & Jaya, R. C. D. (2023). A study of sustainable waste management using theory of planned behaviour in traditional agricultural markets. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*.
- Anggaraeni, R. P. (2019). *Analisis Program Pendidikan Gratis Di Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta*.
- Anindita Meutiasari, Kismartini Kismartini, R. H. (n.d.). *Urgensi Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah*.
- Kebijakan, F., Pengolahan, S., Perkotaan, S., Chalik, A. A., Lay, B. W., Fauzi, A., ETTY, R., & Pajajaran, J. (2011). *BERKELANJUTAN Studi Kasus : DKI Jakarta*.
- Kencana, N. (2016). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten ogan komering ulu*. 2(1), 17–22.
- Prihatin, R. B. (2020). *Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang : Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta*. 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1505>
- Saputra, T., Astuti, W., Nasution, S. R., & Zuhdi, S. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Community Participation In*. 13(3), 246–251.
- Utari, E., Rahmah, A., Nurapni, R., & Nisa, R. (2022). *Analisis Hubungan Pola Konsumsi Terhadap Produksi Sampah Domestik Mahasiswa Pendidikan Biologi Untirta*. 6(November), 238–247.